



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kupang.
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Design Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Arsitektur SPBE Tahun 2019-2024.

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Arsitektur Proses Bisnis
 - b. Arsitektur Layanan SPBE
 - c. Arsitektur Aplikasi SPBE
 - d. Arsitektur Data dan Informasi
- (2) Uraian Arsitektur SPPBE Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5


Penyelenggaraan SPBE oleh Prangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan wajib melakukan penyesuaian pelaksanaannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku. |

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI KUPANG, 
KORINUS MASNENO ✓

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 15 Desember 2022

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 


✓ NOVITA D. E. FOENAY

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 93 /

LAMPIRAN
PERATURAN
BUPATI KUPANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
ARSITEKTUR
SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK
KABUPATEN
KUPANG TAHUN
2019-2024

URAIAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019-2024

ARSITEKTUR

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. /

Arsitektur SPBE Nasional terdiri dari:

- a. referensi arsitektur, dan
- b. domain arsitektur.

Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:

1. domain arsitektur Proses Bisnis;
2. domain arsitektur data dan informasi;
3. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan domain arsitektur Layanan SPBE /

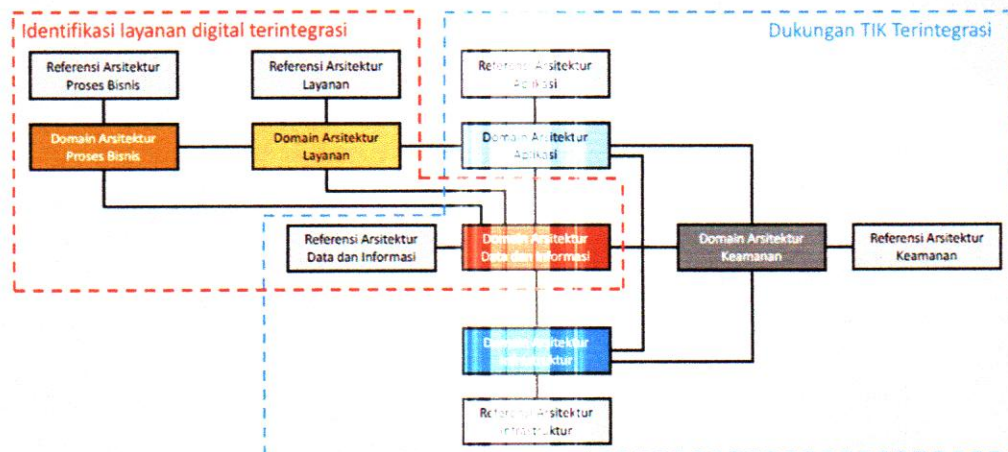
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah:

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

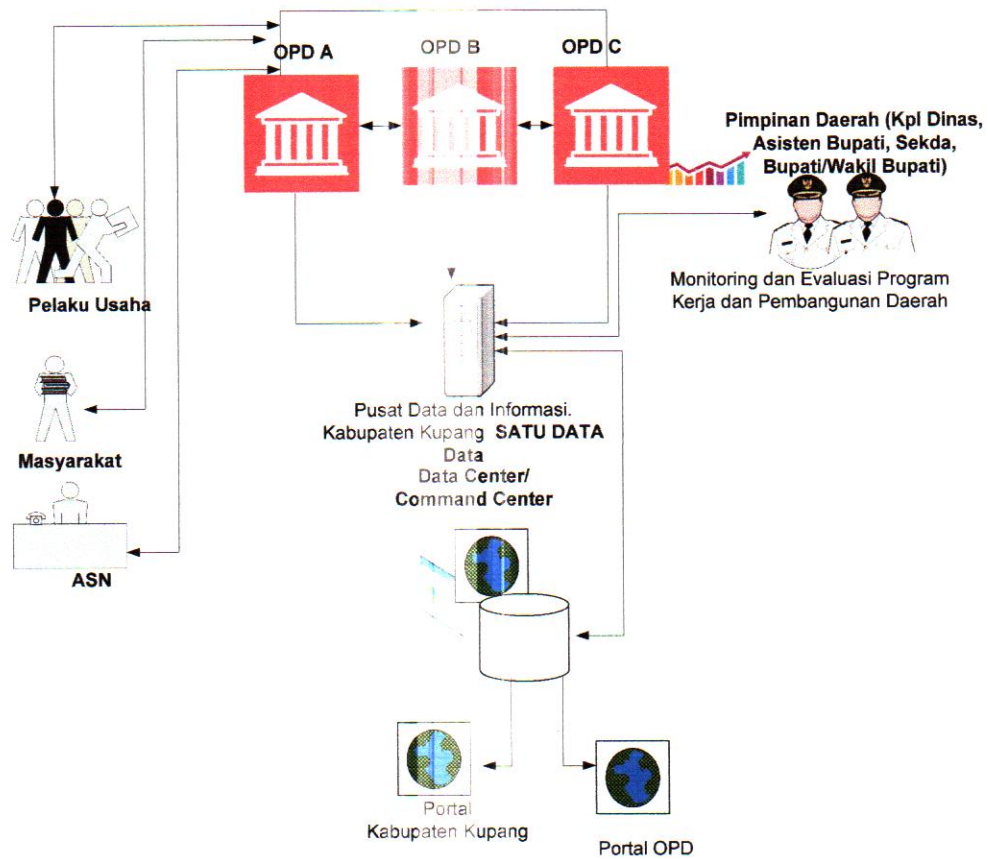
Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
- perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah; atau
- perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.



Gambar 3.1 Keterkaitan Antar Domain Arsitektur



Gambar 3.2 Arsitektur Proses Integrasi Data dan Informasi Lintas OPD

I. DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE

A. Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. Dalam penyusunan Proses Bisnis kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

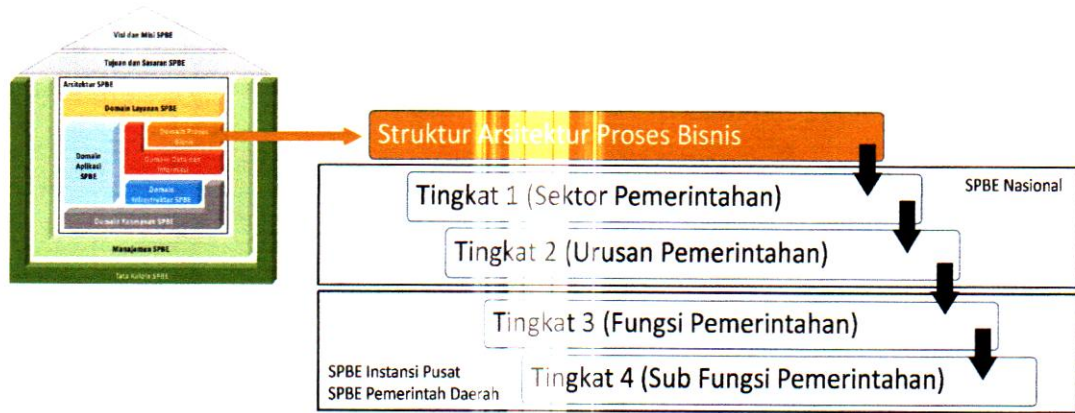
Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.

Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.

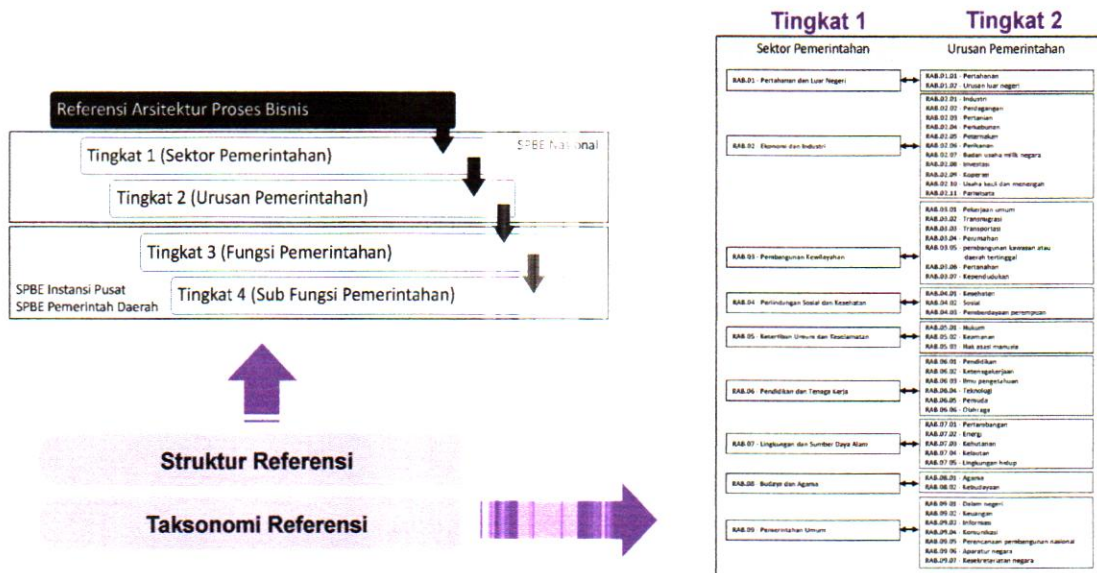
Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.



Gambar 3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Identifikasi Dan Validasi RAB Arsitektur Proses Bisnis



Gambar 3.3 Struktur Referensi Domain Arsitektur Proses Bisnis

Dalam mengidentifikasi Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) (proses bisnis) referensi arsitektur proses bisnis terbagi menjadi 2 (dua) yaitu SPBE Nasional dan SPBE instansi pusat, SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah. Pada SPBE nasional terdapat 2 level yaitu Level 1 (tingkat 1): Sektor Pemerintahan, dan Level 2 (tingkat 2) Urusan Pemerintahan. SPBE Pemerintah daerah terdiri dari level 3 (tingkat 3): Fungsi Pemerintahan dan Level 4 (tingkat 4) Sub Fungsi Pemerintahan.

B. Arsitektur Proses Bisnis

Tabel 3.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis

No	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)	Uraian Unit Kerja	ID Unit Kerja
1	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Gizi Buruk	RAB.04.01.01.01 data gizi buruk, rekapitulasi jumlah gizi buruk berdasarkan puskesmas, posyandu, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan	
	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Stunting	RAB.04.01.02.01 Olah data Stunting, rekapitulasi jumlah Stunting berdasarkan puskesmas,	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan	

1

				posyandu, desa, kecmatan, data berdasarkan tahun			
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Tingkat Kematian	RAB.04.01.03.01 Olah data Kematian, rekapitulasi data Kematian berdasarkan puskesmas, posyandu, desa, kecmatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan		
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Keluarga Sehat	RAB.04.01.04.04 Olah data keluarga sehat, rekapitulasi data keluarga sehat berdasarkan puskesmas, posyandu, desa, kecmatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan		
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.05 Keluarga Sehat	RAB.04.01.05.01 Data rekam medik (jumlah rawat jalan, rawat inap, jenis	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, Dinas Kesehatan		

1

				penyakit, tahun dta)			
RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.06 Rekam Medik	RAB.04.01.06.01 Olah data rekam medik pasien, rekapitulasi data rekam medik pasien berdasarkan puskesmas, posyandu, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kesehatan	Posyandu, Puskesmas, rumah Sakit, Dinas Kesehatan		
RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Satuan Pendidikan	RAB.06.01.01.01 Olah data satuan pendidikan, rekapitulasi data satuan pendidikan berdasarkan desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Tenaga Pendidikan (guru)	RAB.06.01.02.01 Olah data guru, rekapitulasi data guru berdasarkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan		

1

				Satuan Pendidikan, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun		Kebudayaan	
RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Tanaga kependidikan (non guru)	RAB.06.01.03.01 Olah data kependidikan (non guru) rekapitulasi data (non guru) berdasarkan Satuan Pendidikan, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Siswa	RAB.06.01.04.01 Olah data siswa, rekapitulasi data siswa berdasarkan Satuan Pendidikan, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

1

	RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.04.01.05 Siswa Baru dan Lulus	RAB.06.01.05.01 Olah data Siswa Baru dan Lulus, rekapitulasi data Siswa Baru dan Lulus berdasarkan Satuan Pendidikan, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	RAB.06 Pendidikan dan tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.06 Siswa Putus Sekolah dan Mengulang	RAB.06.01.06.01 Olah data Siswa Putus dan Mengulang, rekapitulasi data Siswa Putus Sekolah dan Mengulang berdasarkan Satuan Pendidikan, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

				Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan desa, kecamatan, data berdasarkan tahun		
	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Lahan dan Produksi Perkebunan	RAB.02.03.04.01 Olah data Bidang Perkebunan, rekapitulasi data Bidang Perkebunan berdasarkan desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pertanian	Kelompok Tani, Petugas penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian
4	RAB.02- Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Lokasi Wisata	RAB.02.01.11.01 Olah data Lokasi Destinasi Wisata , rekapitulasi data Lokasi Destinasi Wisata berdasarkan desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pariwisata	Petugas Lokasi wisata, Dinas Pariwisata

1

RAB.02- Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.02 Kawasan Wisata	RAB.02.01.12.01 Olah data Kawasan Wisata, rekapitulasi data Kawasan Wisata berdasarkan Kawasan Wisata, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pariwisata	Petugas Lokasi wisata, Dinas Pariwisata	
RAB.02- Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.03 Rekap Jumlah Wisman	RAB.02.01.13.01 Olah data hotel / penginapan, rekapitulasi data hotel / penginapan berdasarkan Kawasan Wisata, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Pariwisata	Ppelaku Usaha Pariwisata, Dinas Pariwisata	
RAB.02- Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.04 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	RAB.02.01.14.01 Olah data industri pariwisata, rekapitulasi data industri pariwisata berdasarkan	Dinas Pariwisata	Ppelaku Usaha Pariwisata, Dinas Pariwisata	

1

				Kawasan Wisata, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun			
	RAB.02- Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Parwisata	RAB.02.11.05 Pajak Retribusi Parwisata	RAB.04.01.10 Olah data Industri Parwisata, rekapitulasi data Industri Parwisata berdasarkan Kawasan Wisata, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Parwisata	Ppelaku Usaha Parwisata, Petugas Retribusi/Pajak, Dinas Parwisata	
5	RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04.01 Tangkapan Ikan	RAB.07.04.01.01 Olah data Bidang tangkapan ikan, rekapitulasi data tangkapan ikan berdasarkan desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelompok Nelayan, TPI, Dinas Kelautan dan Perikanan	

1

	RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04.02 Rumput Laut	RAB.07.04.02.01 Olah data produksi rumput laut, rekapitulasi data produksi rumput laut berdasarkan Bidang Perikanan Tangkap, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelompok Petani Rumput Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.04 Kelautan dan Perikanan	RAB.07.04.03 Garam	RAB.07.04.03.01 : Olah data produksi garam, rekapitulasi data produksi garam berdasarkan Bidang Perikanan tangkap, desa, kecamatan, data berdasarkan tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelompok Petani Garam, Dinas Kelautan dan Perikanan	
6	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .01 Profile Penduduk	RAB.03.07.01.01 Profile Penduduk	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
	RAB.03	RAB.03.07	RAB.03.07	RAB.03.07,01.02	Dinas	Dinas	

1

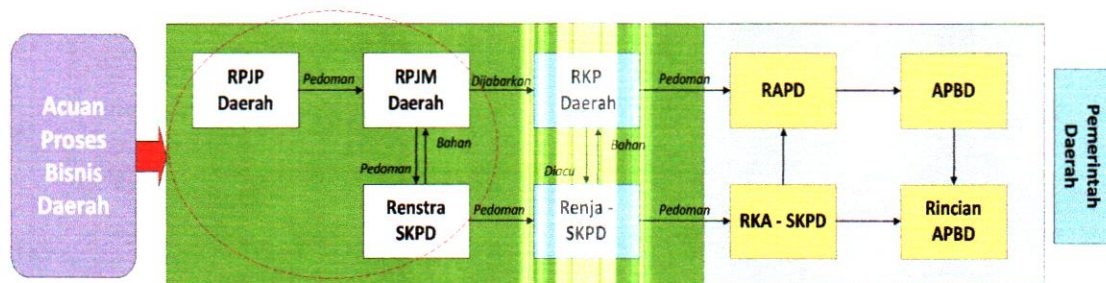
Pembangunan Kewilayahan	Kependudukan	.01 Profile Penduduk	Kelahiran	Kependudukan	Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .01 Profile Penduduk	RAB.03.07.01.03 Profile Kematian	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .01 Profile Penduduk	RAB.03.07.01.04 Rekap jumlah penduduk	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .01 Profile Penduduk	RAB.03.07.01.05 Rekap jumlah penduduk	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .01 Profile Penduduk	RAB.03.07.01.06 Rekap jumlah penduduk	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .02 Perpindahan Penduduk	RAB.03.07 .02.01 Pindah Masuk	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .02 Perpindahan Penduduk	RAB.03.07 .02.02 Pindah Keluar	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .03 Kepala Keluarga	RAB.03.07 .03.01 Kepala Keluarga	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07 .03 Kepala Keluarga	RAB.03.07 .03.01 Rekap Jumlah Kepala Keluarga	Dinas Kependudukan	Dinas Kependudukan	

1

RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.03 Pajak dan Retribusi	RAB 09.05.03.03 Penerimaan Pajak dan Retribusi	Badan Pengelola Aset Daerah dan Keuangan	OPD, BPADK	
RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.03 Pajak dan Retribusi	RAB 09.05.03.04 Penerimaan Pajak dan Retribusi OPD	Badan Pengelola Aset Daerah dan Keuangan	OPD, BPADK	
RAB 09 Pemerintahan Umum	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB 09.05.03 Pajak dan Retribusi	RAB 09.05.03.05 Monitoring Pajak dan Retribusi OPD	Badan Pengelola Aset Daerah dan Keuangan	OPD, BPADK	

1

2019-2024. Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedomaan pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP Daerah. Rencana Anggaran Belanja Daerah (RABD) berpedomaan pada RKP Daerah. Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah (RKA-Daerah) SKPD berpedomaan pada Renja SKPD.



Gambar 3.3. Proses Identifikasi Domain Proses Bisnis

C. Keterpaduan Arsitektur Proses Bisnis Berdasarkan OPD

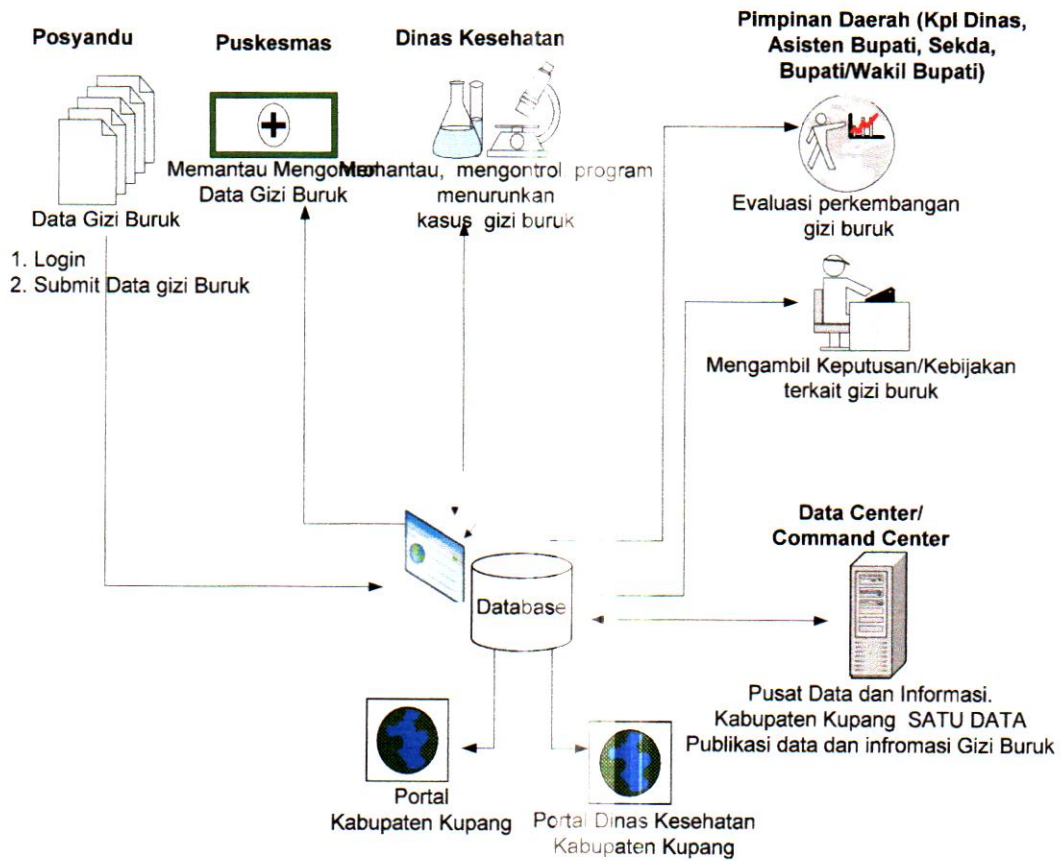
Arsitektur proses bisnis merupakan suatu desain proses untuk menerjemahkan semua visi dan strategi supaya seluruh kegiatan organisasi menjadi efektif. Desain proses tersebut akan dilakukan jika ada perubahan visi dan strategi dalam suatu organisasi atau jika semua kegiatan pada organisasi semakin rumit. Berikut ini akan digambarkan peta proses bisnis untuk berdasarkan organisasi perangkat daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

1. Arsitektur proses bisnis Dinas Kesehatan

Arsitektur proses bisnis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang akan digambarkan secara utuh untuk beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin.

Berikut ini digambarkan proses bisnis yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang

a. Contoh Proses Bisnis Gizi Buruk



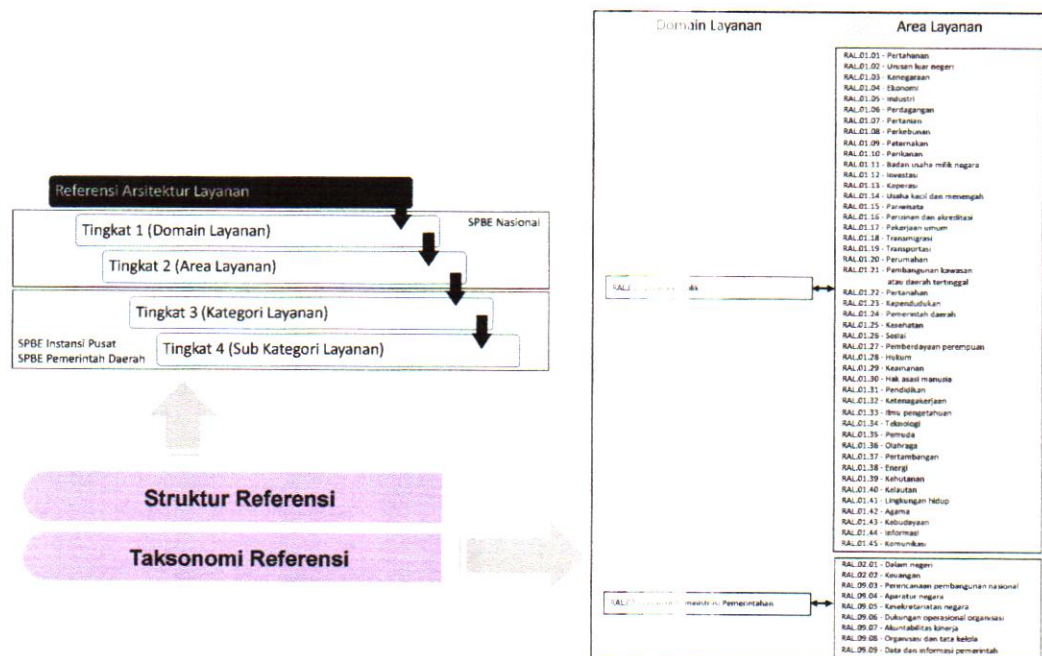
Gambar 3.4. contoh Aktivitas Peta Proses Bisnis Gizi Buruk

Untuk Aktivitas Peta Proses Bisnis selengkapnya dapat dilihat pada Buku Arsitektur SPBE

II. DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Dalam SPBE terdapat Layanan yang perlu ditransformasi digitalkan untuk mendukung visi misi dan tujuan SPBE. Layanan SPBE terbagi menjadi 2 kategori yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Berikut ini merupakan gambaran mengenai layanan yang perlu ada dalam SPBE. Berdasarkan data hasil assessment terhadap kondisi saat ini pada layanan SPBE di Kabupaten Kupang, seluruh layanan SPBE yang ada telah didukung oleh pemanfaatan sistem informasi, hanya saja kedepan perlu adanya integrasi antar sistem di Kabupaten Kupang, baik integrasi dengan sistem internal daerah maupun dengan sistem kementerian pusat.

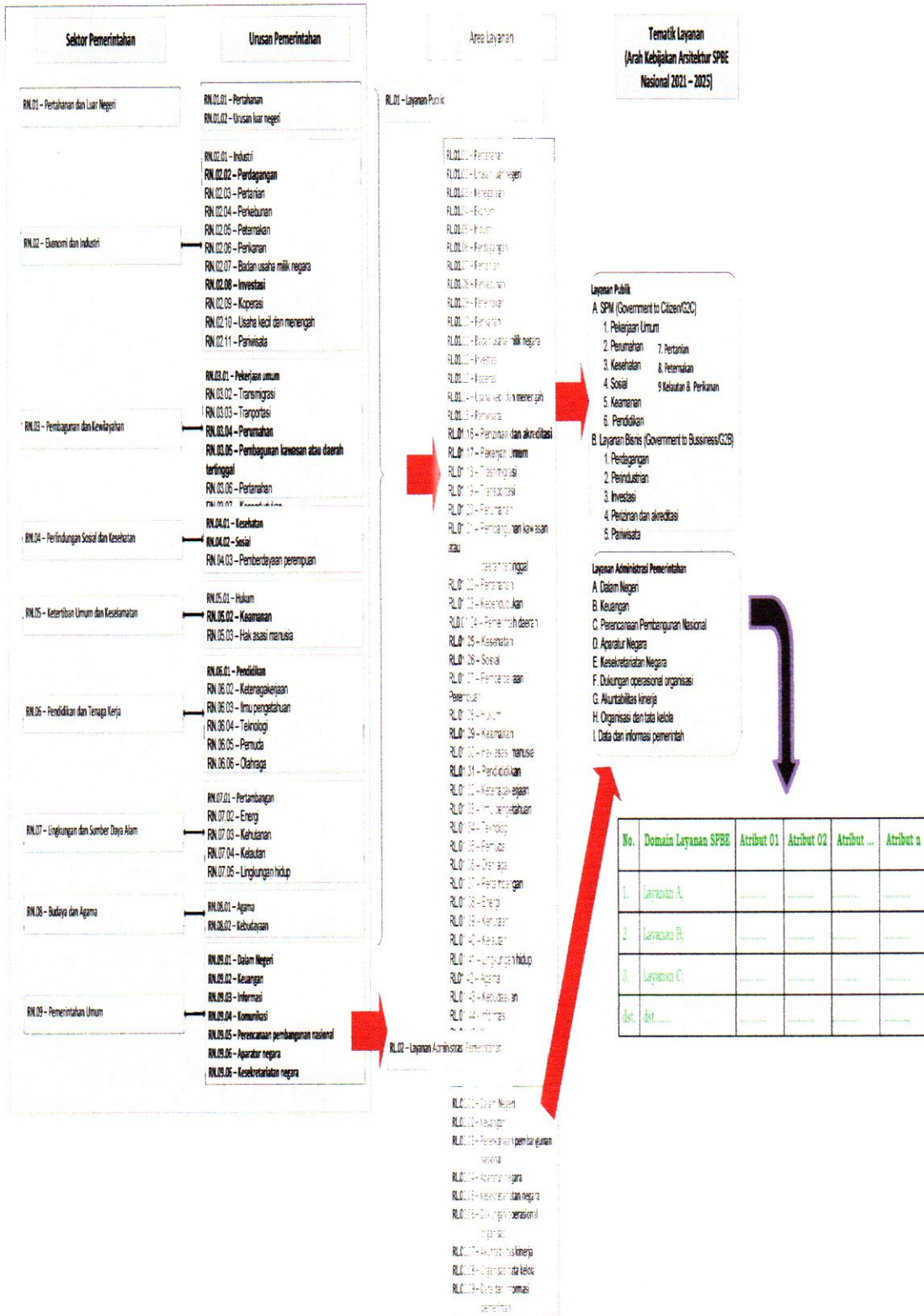
Referensi Arsitektur Layanan (RAL) pada level SPBE Nasional terdiri dari Tingkat 1 (domain Layanan) dan tingkat 2 (Area Layanan). Sedangkan Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari Tingkat 3 (Kategori Layanan) dan tingkat 4 (Sub Kategori layanan)



Gambar 3.31. Referensi Arsitektur Layanan (RAL) SPBE

Berdasarkan model Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kupang mengelompokan Layanan menjadi dua kelompok besar, yaitu Layanan Publik (untuk G2C dan G2B) dan Layanan Administrasi Pemerintahan (untuk G2E dan G2G).

Pengisian metadata arsitektur Layanan



Gambar 3.32. Metadata Arsitektur Layanan SPBE

Identifikasi domain layanan SPBE Kabupaten Kupang berdasarkan RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 dan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Identifikasi kategori dan sub kategori layanan berdasarkan arsitektur proses bisnis.

1. Arah Kebijakan dan Strategi RPMJD

Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien, dan produktif. Strategi tersebut merupakan tindakan atau cara yang dipilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dengan dukungan strategi sistem informasi dan teknologi informasi.

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 menjadi arah dan kebijakan strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui visi, misi, tujuan, sasaran SPBE yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk arah kebijakan dan strategi SPBE yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kupang tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Kupang 2005-2025. Berikut strategi, arah kebijakan RPMJD Kabupaten Kupang tahun 2019-2024 melalui strategi teknologi informasi dan sistem informasi yang terdapat pada Arsitektur Layanan SPBE:

2. Deskripsi Fungsi Arsitektur Layanan SPBE

Tabel 3.2. Contoh Layanan Dinas Kesehatan

1.	Domain Layanan : RA.01 Layanan Publik Area Layanan : RA.01.25 Kesehatan (RAL Tingkat 2) OPD/Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kategori : Pengembangan Aplikasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sasaran strategi Program Prioritas: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
No	Domain Layanan SPBE (RAL Tingkat 3)	Uraian Deskripsi Modul/Fungsi	
1	RA.01.25.01: Layanan informasi sarana kesehatan	Profile data dan informasi - Rumah sakit, puskesmas, posyandu, poliklinik. - Tempat praktek kesehatan, - industri rumah tangga - Apotik, toko obat dll.	
2	RA.01.25.02: Layanan aktivitas posyandu	Aktivitas posyandu (tumbuh kembang balita, stunting, dan gizi buruk).	
3	RA.01.25.03: Sistem Informasi Eksekutif-SIE	Publikasi informasi tingkat pimpinan (kepala puskesmas, kepala bidang, kepala dinas dan intansi teknis terkait). Layanan Informasi umum, wajib, berkala, dan informasi lainnya pada Dinas Kesehatan.	

		Sebaran/ statistic penyakit, obat-obatan, tingkat, perkembangan pasien,	
4	RA.01.25.04: Portal Website puskesmas	Data dan informasi tingkat puskesmas terintegrasi dengan portal dinas kesehatan.	
5	RA.01.25.05: Portal website Dinas Kesehatan dan terintegrasi dengan portal Pemda Kabupaten Kupang.	Integrasi antar aplikasi untuk semua aplikasi dalam rangka mensupport data dan informasi level pimpinan dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi	
6	RA.01.25.06: Layanan informasi sarana kesehatan	Profile data dan informasi - Rumah sakit, puskesmas, posyandu, poliklinik, - Tempat praktek kesehatan, - industri rumah tangga - Apotik, toko obat dll.	

Untuk Arsitektur Layanan selengkapnya dapat dilihat pada Buku Arsitektur SPBE. |

III. DOMAIN ARSITEKTUR APLIKASI

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan oleh Instansi pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
- b. Aplikasi Khusus.

Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, pada Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, atau setidaknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang.

A. Aplikasi Umum:

Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Dalam hal Instansi Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Dalam menggunakan aplikasi sejenis Pemerintah Daerah harus:

- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Aplikasi Umum dan kode sumbernya (*source code*/kode program) didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE. repositori Aplikasi SPBE dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang.

B. Aplikasi Khusus:

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

C. Model Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 1 terdiri dari :

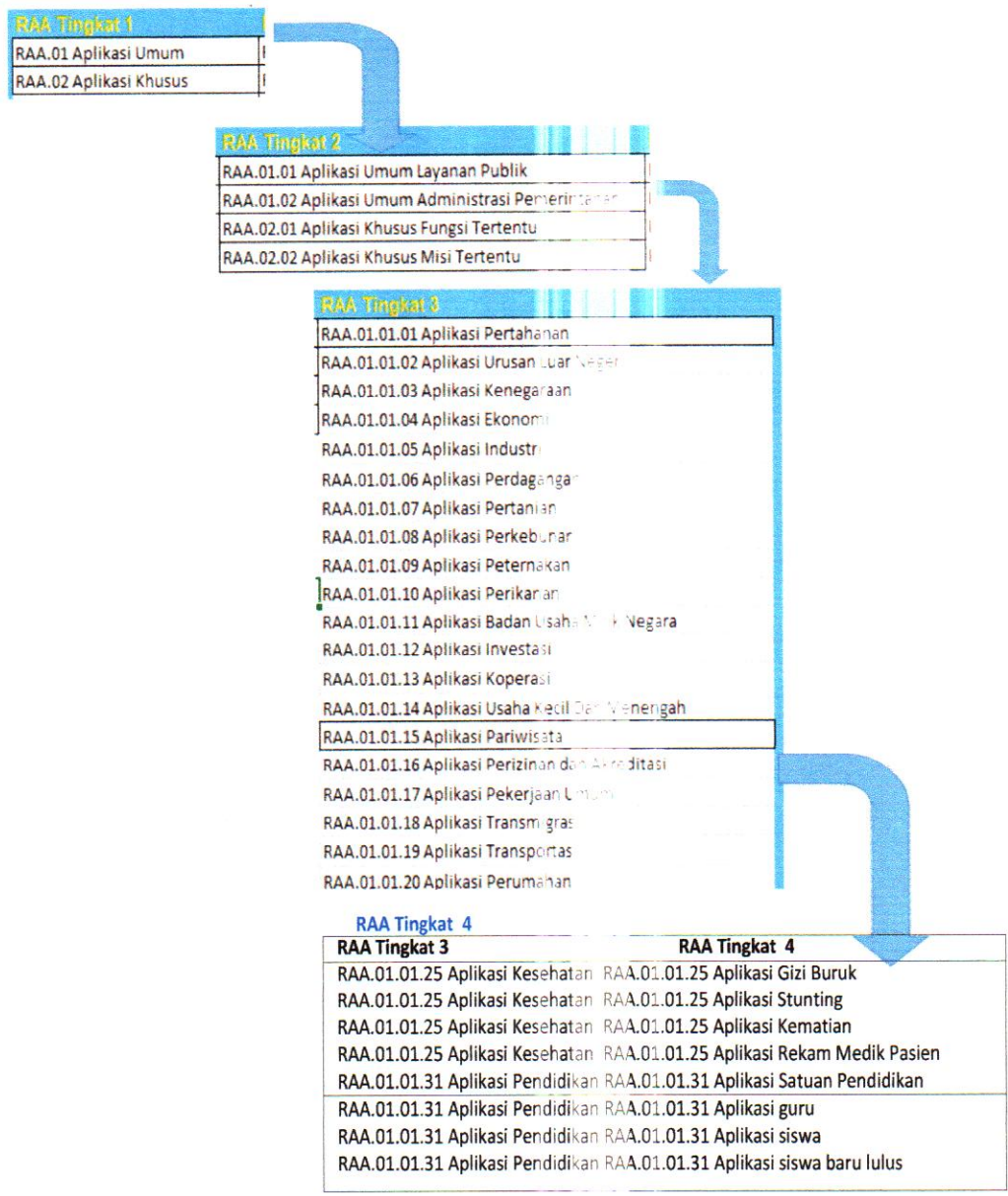
1. RAA.01 Aplikasi Umum
2. RAA.02 Aplikasi Khusus

Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 2 terdiri dari :

1. RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
2. RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
3. RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
4. RAA.02.02 Aplikasi Khusus Misi Tertentu

Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 2 terdiri dari berbagai Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) Level 3. |

Berikut Gambar model Referensi Arsitektur Aplikasi sebagai berikut:



Gambar 3.60 Model Referensi Arsitektur Aplikasi

D. Arsitektur Aplikasi SPBE

Tabel 3.16 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

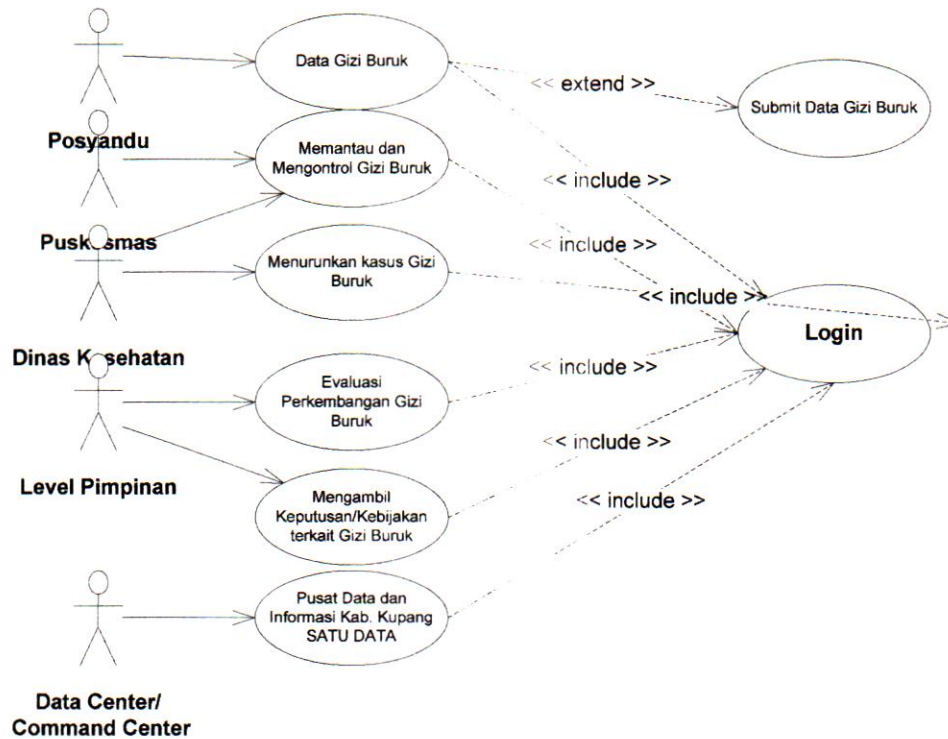
RAA Tingkat 3	RAA Tingkat 3
RAA.01.01.07 Aplikasi Pertanian	RAA.01.01.07.01 Aplikasi Lahan dan Produksi Pangan
	RAA.01.01.07.02 Aplikasi Holtikultura
	RAA.01.01.07.03 Aplikasi SDM Pertanian, Kompetensi, dan Penyuluhan
RAA.01.01.08 Aplikasi Perkebunan	RAA.01.01.08.01 Aplikasi Lahan, Prodiusi Perkebunan
RAA.01.01.10 Aplikasi Perikanan	RAA.01.01.10.01 Aplikasi bnatuan kelompok nelayan
	RAA.01.01.10.02 Aplikasi kelompok nelayan dan penangkapan ikan
	RAA.01.01.10.03 Aplikasi kelompok petani rumput laut dan produksi rumput laut.

	RAA.01.01.10.04 Aplikasi kelompok petani garam dan produksi garam
RAA.01.01.15 Aplikasi Pariwisata	RAA.01.01.15.01 Aplikasi Potensi kawasan wisata
	RAA.01.01.15.02 Aplikasi kunjungan kawasan wisata
	RAA.01.01.15.03 Aplikasi jumlah wisman
	RAA.01.01.15.01 Aplikasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	RAA.01.01.15.01 Aplikasi pajak dan retribusi bidang pariwisata
RAA.01.01.23 Aplikasi Kependudukan	RAA.01.01.23.01 Aplikasi Profile data penduduk
	RAA.01.01.23.02 Aplikasi Profile rekap jumlah penduduk
	RAA.01.01.23.03 Aplikasi Profile tingkat kelahiran
	RAA.01.01.23.04 Aplikasi Profile tingkat kematian
	RAA.01.01.23.05 Aplikasi Kepala keluarga
RAA.01.01.25 Aplikasi Kesehatan	RAA.01.01.25.01 Aplikasi gizi buruk
	RAA.01.01.25.02 Aplikasi sunting
	RAA.01.01.25.03 Aplikasi kelahiran
	RAA.01.01.25.04 Aplikasi kematian
	RAA.01.01.25.05 Aplikasi rekammedik
	RAA.01.01.25.06 Aplikasi tanda daftar usaha bidang kesehatan
	RAA.01.01.25.07 Aplikasi keluarga sehat
RAA.01.01.31 Aplikasi Pendidikan	RAA.01.01.31.01 Aplikasi Satuan pendidikan
	RAA.01.01.31.02 Aplikasi guru dan kompetensi guru
	RAA.01.01.31.03 Aplikasi siswa
	RAA.01.01.31.04 Aplikasi siswa dropout dan mengulang
	RAA.01.01.31.05 Aplikasi siswabarur dan lulus
RAA.01.01.40 Aplikasi Kelautan	RAA.01.01.40.01 Aplikasi potensi perikanan dan kelautan
	RAA.01.01.40.02 Aplikasi Kawasan pantai dan kelautan
RAA.01.02.03 Aplikasi Perencanaan Pembangunan Nasional	RAA.01.02.01 Aplikasi anggaran dan program kerja
	RAA.01.02.02 Aplikasi aaset daerah
	RAA.01.02.02 Aplikasi pajak dan retribusi

E. Gambar Arsitektur Aplikasi SPBE

1. Dinas Kesehatan :

a. Arsitektur Aplikasi Gizi Buruk



Gambar 3.32 Arsitektur Aplikasi Proses Bisnis Gizi Buruk

Untuk Arsitektur Aplikasi selengkapnya dapat dilihat pada Buku Arsitektur SPBE.

IV. ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

A. Manajemen Data SPBE

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki model arsitektur data berdasarkan kebutuhan layanan masing-masing. Manajemen arsitektur data terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi data (format dan struktur baku untuk data induk dan referensi) dan ketentuan data (tata perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data).

Sasaran manajemen data SPBE: 1) memahami kebutuhan data; 2) mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas data; 3) meningkatkan kualitas data secara terus menerus; 4) memaksimalkan penggunaan data dan memberikan hasil yang efektif.

Proses pengelolaan manajemen data meliputi: 1) Arsitektur data, 2) data induk dan data referensi, 3) basis data, dan 4) Kualitas data. Manajemen basis data: untuk menjamin data yang akurat, mutakhir dapat dibagikan, menjamin ketersediaan akses data terus menerus, dan menjaga keamanan data.

Kegiatan manajemen basis data meliputi: mendefinisikan kebutuhan data dan produsen data untuk basis data; mengelola basis data di Pusat Data Nasional; dan menyebarluaskan basis data melalui portal portal kabupaten/OPD.



Gambar 3.61 Referensi Arsitektur Informasi

Arsitektur data akan mengidentifikasi seluruh komponen data yang digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh setiap layanan aplikasi. Dalam membuat rancangan arsitektur data untuk setiap layanan SPBE, akan digunakan *tools Class Diagram*. *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan model konseptual data yang berupa entitas, atribut, dan relasi. *Class diagram* juga berguna untuk menunjukkan hubungan antar kelas dalam suatu sistem.

B. Referensi Arsitektur Data (RAD) SPBE

Tabel 3.17 Referensi Arsitektur Data SPBE

RAD Tingkat 1	RAD Tingkat 2
RAD.01 Informasi Pertahanan dan Luar Negeri	RAD.01.01 Data pertahanan
	RAD.01.02 Data urusan luar negeri
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data industri
	RAD.02.02 Data perdagangan
	RAD.02.03 Data pertanian
	RAD.02.04 Data perkebunan
	RAD.02.05 Data peternakan
	RAD.02.06 Data perikanan
	RAD.02.07 Data badan usaha milik negara
	RAD.02.08 Data investasi
	RAD.02.09 Data koperasi
	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah
	RAD.02.11 Data pariwisata
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data pekerjaan umum
	RAD.03.02 Data transmigrasi
	RAD.03.03 Data transportasi
	RAD.03.04 Data perumahan
	RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
	RAD.03.06 Data pertanahan
	RAD.03.07 Data kependudukan
RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data kesehatan
	RAD.04.02 Data sosial
	RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan
RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.01 Data hukum
	RAD.05.02 Data keamanan
	RAD.05.03 Data hak asasi manusia
RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data pendidikan
	RAD.06.02 Data ketenagakerjaan
	RAD.06.03 Data ilmu pengetahuan dan teknologi
	RAD.06.04 Data pemuda
	RAD.06.05 Data olahraga
RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.01 Data pertambangan
	RAD.07.02 Data energi
	RAD.07.03 Data kehutanan
	RAD.07.04 Data kelautan
	RAD.07.05 Data lingkungan hidup
RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.01 Data agama
	RAD.08.02 Data kebudayaan
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data dalam negeri
	RAD.09.02 Data keuangan
	RAD.09.03 Data informasi
	RAD.09.04 Data komunikasi
	RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional

	RAD.09.06 Data aparatur negara
	RAD.09.07 Data kesekretariatan negara
RAD.10 Data Pendukung Umum	RAD.10.01 Data Kebijakan Pemerintah
	RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan
	RAD.10.03 Data Kewilayahan
	RAD.10.04 Data Dukung Lainnya

C. Referensi Arsitektur *Informasi* (RAI) SPBE

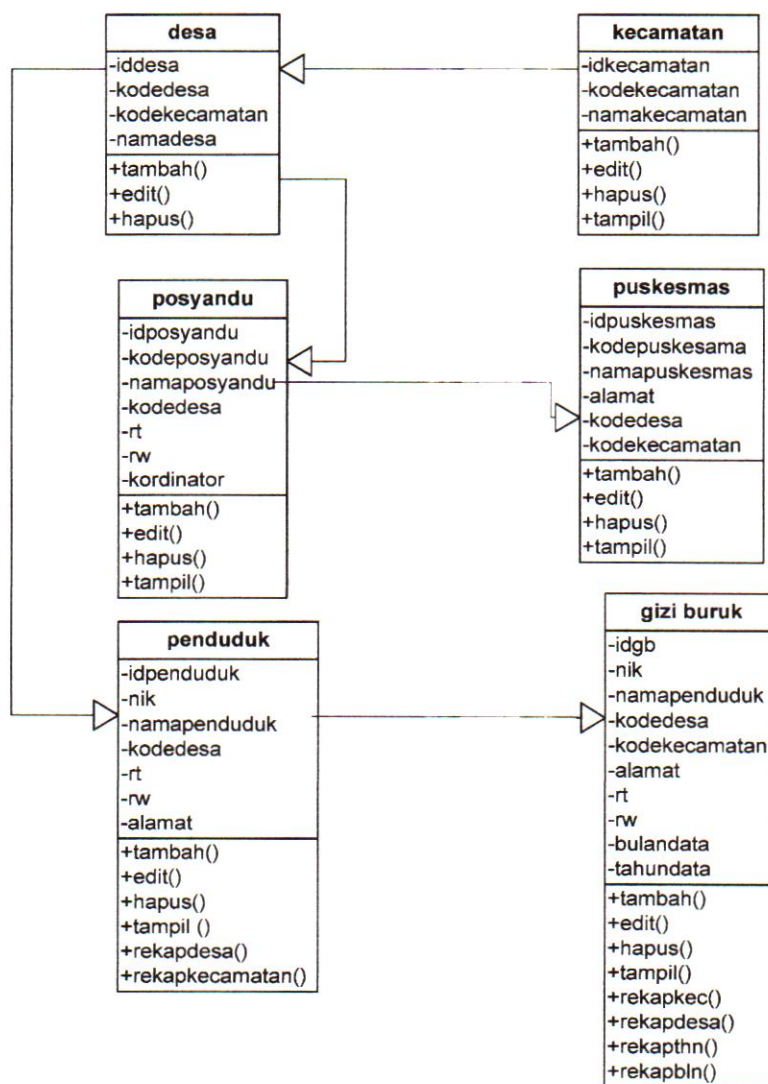
Tabel 3.18 Referensi Arsitektur Informasi SPBE

RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional
		RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat
		RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
		RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah
		RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan
	RAI.01.02 Pusat Kendali	RAI.01.02.01 Network Operation Center
		RAI.01.02.02 Data Operation Center
		RAI.01.02.03 Command/Operation Center
		RAI.01.02.04 Security Operation Center
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center
	RAI.01.03 Fasilitas Komputasi	RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm
RAI.01.03.03 Workstation Farm		
RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah
RAI.03 Platform	RAI.03.01 Perangkat Keras	RAI.03.01.01 Server
		RAI.03.01.02 Data Storage
		RAI.03.01.03 Network and Communication Device
		RAI.03.01.04 Security Device
		RAI.03.01.05 Peripheral
		RAI.03.01.06 Mobile Device
	RAI.03.02 Perangkat Lunak	RAI.03.02.01 Sistem Operasi
		RAI.03.02.02 Sistem Utilitas
		RAI.03.02.03 Sistem Database
	RAI.03.03 Teknologi Awan	RAI.03.03.01 PaaS
		RAI.03.03.02 IaaS
		RAI.03.03.03 IaaS
		RAI.03.03.04 BaaS

D. Arsitektur Class Diagram

1. Arsitektur Class Diagram Dinas Kesehatan

a. Arsitektur Data pada proses Bisnis Gizi Buruk



Gambar 3.62 Class Diagram gizi buruk

Terdapat enam kelas yang dibutuhkan oleh proses bisnis gizi buruk, yaitu desa, kecamatan, puskesmas, posyandu, penduduk, giziburuk.

1. Kelas kecamatan memiliki *multiplicity* 1 → * (satu ke banyak) terhadap kelas desa. Realsi antara kelas kecamatan dan kelas desa menggunakan atribut kodekec.
2. Kelas desa memiliki *multiplicity* 1 → * (satu ke banyak) terhadap kelas posyandu. kecamatan memiliki *multiplicity* 1 → * (satu ke banyak) terhadap kelas desa. Realsi antara kelas desa dan kelas posyandu menggunakan atribut kodedesa.
3. Kelas penduduk memiliki *multiplicity* 1 → * (satu ke banyak) terhadap kelas giziburuk. Realsi antara kelas penduduk dan kelas giziburuk menggunakan atribut nik.
4. Kelas puskesmas memiliki *multiplicity* 1 → * (satu ke banyak) terhadap kelas posyandu. Realsi antara kelas puskesmas dan kelas posyandu menggunakan atribut kode puskesmas.

Untuk Class diagram selengkapnya dapat dilihat pada Buku Arsitektur SPBE. 1

Tabel 3.19 Kamus Data Tabel Desa

Kamus Data Tabel Desa:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
desa	desa	kodedesa	kodekecamatan	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
iddesa	iddesa	Integer	8	
kodedesa	kodedesa	Character	8	
kodekecamatan	kodekecamatan	Character	8	
namadesa	namadesa	Character	50	

Tabel 3.20 Kamus Data Tabel Kecamatan

Kamus Data Tabel Kecamatan:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
kecamatan	kecamatan	kodekecamatan	-	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idkecamatan	idkecamatan	Integer	8	
kodekecamatan	kodekecamatan	Character	8	
namakecamatan	namakecamatan	Character	50	

Tabel 3.21 Kamus Data Tabel Posyandu

Kamus Data tabel Posyandu:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
posyandu	posyandu	kodeposyandu	kodedesa	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idposyandu	idposyandu	Integer	8	
kodeposyandu	kodeposyandu	Character	8	
kodedesa	kodedesa	Character	8	
rt	rt	Character	3	
rw	rw	Character	3	
koordinator	koordinator	Character	8	

Tabel 3.22 Kamus Data Tabel Puskesmas

Kamus Data tabel Puskesmas:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
puskesmas	puskesmas	kodepuskesmas	kodedesa	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idpuskesmas	idpuskesmas	Integer	8	
kodepuskesmas	kodepuskesmas	Character	8	
namapuskesmas	namapuskesmas	Character	50	
alamat	Alamat	Character	50	
kodedesa	Kodedesa	Character	8	
kodekecamatan	kodekecamatan	Character	8	

Tabel 3.23 Kamus Data Tabel Penduduk

Kamus Data tabel Penduduk:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
penduduk	penduduk	idpenduduk	kodedesa	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idpenduduk	idpenduduk	Integer	8	
nik	nik	Character	16	
namapenduduk	namapenduduk	Character	50	
kodedesa	kodedesa	Character	8	
rt	rt	Character	3	
rw	rw	Character	3	
alamat	alamat	Character	50	

Tabel 3.24 Kamus Data Tabel Gizi Buruk

Kamus Data tabel Gizi Buruk:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
giziburuk	giziburuk	idgiziburuk	kodedesa, kodekecamatan	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idgiziburuk	idgiziburuk	Integer	8	
nik	nik	Character	16	
namapenduduk	namapenduduk	Character	50	
kodedesa	kodedesa	Character	8	
kodekecamatan	kodekecamatan	Character	50	
alamat	alamat	Character	50	
rt	rt	Character	3	
rw	rw	Character	3	
bulandata	bulandata	Character	12	
tahundata	tahundata	Character	4	

Tabel 3.25 Kamus Data Tabel Stunting

Kamus Data tabel Stunting:

Nama Tabel		Key		Ket
Di Sistem	Di Program	Primary	Foreign	
stunting	stunting	idstunting	kodedesa	
Nama Field		Type	Lebar	
Di Sistem	Di Program			
idstunting	idstunting	Integer	8	
nik	nik	Character	16	
namapenduduk	namapenduduk	Character	255	
kodedesa	kodedesa	Character	8	
alamat	alamat	Character	255	
rt	rt	Character	3	
rw	rw	Character	255	
bulandata	bulandata	Character	12	
tahundata	tahundata	Character	4	

Untuk Kamus data tabel / metadata selengkapnya dapat dilihat pada Buku Arsitektur SPBE.

BUPATI KUPANG,


KORINUS MASNENO